

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Praktik demokrasi terbuka di Indonesia telah sampai taraf penentuan anggota legislatif, hal ini ditandai dengan penyertaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif (Pileg). Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten mengatur pileg yang meningkatkan konstalasi politik. Partisipasi masyarakat dalam pileg terlihat dari dinamika dukungan pada calon masing – masing legislatif melalui organisasi dan kelompok – kelompok kepentingan yang ada.

Pencalonan anggota legislatif petahana memerlukan kendaraan politik dan dukungan untuk memenangkan pileg, setiap partai politik memiliki hak untuk memilih calon – calon legislatifnya untuk kemudian didukung dan diusung. Dukungan pasangan calon legislatif didapatkan dari kelompok partisan maupun kelompok diluar area lingkaran partai politik. Kelompok pendukung ini akan menjadi jaringan politik yang kuat dalam kemenangan masing – masing calon legislatif (Denny, 2006). menjelaskan bahwa jaringan politik merupakan suatu jaringan di mana ikatan – ikatan politik yang menghubungkan satu aktor politik ke aktor politik lain untuk menjalin hubungan politik yang kuat. Menurut Denny, (2006) juga menyebutkan bahwa pada hubungan politik yang kuat terjadi interaksi politik yang berkelanjutan sehingga satu sama lain terikat dengan seperangkat harapan yang sama.

Jaringan politik dapat menjadi landasan utama calon legislatif dalam melakukan kampanye politik, media kampanye politik di bagi menjadi dua, yaitu konvensional dan non-konvensional. Media kampanye konvensional identik dengan

kampanye menggunakan selebaran, pamflet, orasi dalam mimbar terbuka, maupun metode kampanye lain yang masih belum menggunakan media modern. Sedangkan pada kampanye non-konvensional, penggunaan media dan jaringan politik lebih fleksibel dan modern melalui cara – cara baru yang tepat sasaran terhadap pemilih. Model kampanye ini misalkan koordinasi dukungan pada komunitas, kampanye melalui sosial media, kampanye melalui gerakan dukungan, dan lainnya.

Salah satu jaringan politik yang dapat meningkatkan jangkauan kampanye yakni melalui kerja aktor – aktor politik yang bergerak membangun dan mampu menggiring opini publik. Selain itu terbentuk dalam kampanye calon legislatif ialah kelompok relawan atau kepentingan non-partai yang ikut serta menjadi aktor politik dalam mendukung pasangan calon legislatif ini. Kelompok non-partai ini biasanya berupa gabungan anak *millienal* atau kalangan petinggi agama yang dianutnya untuk diajak berkampanye dan disisi lain yang mulai memahami politik dan memutuskan untuk mendukung salah satu dari calon legislatif ini, kelompok ini terpisah dengan kelompok partisan dari partai politik (Nugroho, 2011). Pada kampanye calon legislatif, kelompok non-partai ini dapat dengan mudah dimobilisasi dan memobilisasi kelompok lain dalam kaitannya dukungan pencalonan. Mobilisasi pencalonan adalah usaha yang bertujuan untuk menggerakkan masyarakat sebagai pemilik hak suara yang sah dalam sebuah pemilihan umum (Nugroho, 2011). Mobilisasi pencalonan merupakan aktivitas penting dalam kampanye politik, dalam meningkatkan dukungan pada pasangan calon peran mobilisasi pencalonan dapat meningkatkan suara pemilih.

Perkembangan komunitas non-partai yang mendukung entitas politik tertentu cukup signifikan, kelompok komunitas ini terbentuk karena adanya persamaan latar belakang, mulai dari komunitas remaja, komunitas pemuda bahkan komunitas masyarakat secara umum dapat secara mudah terbentuk disetiap daerah di Indonesia. Potensi komunitas dengan anggota yang cukup banyak memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat, sehingga elit politik mulai tertarik untuk melakukan pendekatan

langsung kepada komunitas non-partai yang dapat memberikan dukungan dalam kontestasi politik.

Dengan memfokuskan diri pada ikatan – ikatan di antara individu-individu ketimbang hanya kualitas yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan untuk mendorong agar berpikir tentang ketidakleluasaan – ketidakleluasaan itu inheren dalam cara – cara hubungan sosial yang di organisasikan. Meskipun hubungan – hubungan sosial yang terwujud belum tentu disadari oleh para pelakunya, hubungan sosial yang terjadi itu sistematis, ada pengulangan dalam kondisi dan situasi atau konteks yang sama. Di satu pihak, hal lain menunjukkan bahwa satu konteks sosial (muatan sosial) membentuk satu jaringan sosial (*partial network*) di pihak lain adanya hukum kuasi atau logika situasional atau struktur sosial dalam Levi-Strauss menyebutnya dengan *order of orders* tentang mana regularitas yang operatif dalam waktu dan ruang mengatur ketidakleluasaan – ketidakleluasaan atas tindakan, sikap, dan perilaku para anggotanya. Dengan demikian memusatkan individu – individu terhadap kompleksitas struktur dan perilaku organisasional.

Subunit sosial memiliki potensi sumber daya yang berbeda satu sama lain. Sumber daya yang tersedia tergantung pada spesifikasi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban masing – masing subunit sosial yang bersangkutan. Artinya didalam masing – masing kegiatan terdapat potensi atau peluang untuk bisa mendatangkan sumber daya atau *reward* organisatoris tertentu yang berharga bagi para anggotanya. Oleh karena itu, hampir semua subunit sosial yang ada dalam organisasi cenderung semaksimal mungkin memanfaatkan segala peluang yang ada pada masing – masing kewajiban tugasnya untuk mendatangkan sumber daya atau *reward – reward* organisatoris yang diinginkan.

Posisi struktural seorang aktor dalam jaringan sangat menentukan akses dan kontrol terhadap sumber daya – sumber daya. Posisi struktural yang relatif lebih tinggi

memunyai akses dan kontrol terhadap *power* dan *reward* atau sumber daya yang lebih besar dibanding mereka yang menduduki posisi struktural yang relatif lebih rendah. Kondisi seperti ini menyebabkan kontak – kontak sosial (kontak personal) menjadi penting dalam tindakan – tindakan instrumental yang dilakukan seseorang.

Kontak – kontak sosial yang dituju adalah sebuah kontak sosial yang mampu menyediakan atau memberikan pengaruh dan informasi dalam rangka pencapaian kepentingan – kepentingan yang diinginkan oleh aktor – aktor yang bersangkutan. Dalam usahanya tersebut mereka mengaktifkan hubungan-hubungan emosi dan hubungan – hubungan *power*. Artinya memodifikasi atau memanipulasi hubungan – hubungan emosi dan hubungan – hubungan *power* yang tidak menutup kemungkinan untuk membina hubungan – hubungan sosial dengan para aktor dari unit – unit lain guna mendapatkan sumber daya – sumber daya yang tersedia itu. Hal ini dikarenakan hubungan sosial antara dua pelaku tertentu tidak harus, bahkan tidak hanya berisi satu jenis muatan sosial didalam kehidupan empirik. Selain itu, meskipun kelihatannya pertukaran yang terjadi diantara dua aktor bersifat timbal balik dan setara (simetris), bila dilihat secara saksama, mungkin saja yang terjadi sebenarnya adalah tidak demikian.

Tumbuh dan berkembang kekuatan – kekuatan politik merupakan fenomena politik kebangsaan, sejak kesadaran nasional muncul pra-kemerdekaan hingga perkembangan politik bangsa dewasa ini. Perbincangan mengenai politik dan demokrasi dalam sejarah politik nasional merupakan pembicaraan yang banyak menyita perhatian publik, mulai dari masyarakat akademik, politisi, aktivis, hingga masyarakat awam. Kemunculan kekuatan – kekuatan politik merupakan manifestasi dan aneka ragam ideologi dan kepentingan yang bersemai dalam masyarakat.

Dalam keikutsertaannya kembali sebagai calon Legislatif petahana, tentunya para petahana – petahana sudah memiliki strategi untuk dapat memenangkan kontestasi

pilihan Legislatif di tahun 2019 kembali. Dengan memiliki pengalaman – pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi serta ditambah dengan memiliki jaringan – jaringan politik yang tersebar didalam setiap wilayahnya yang ada pada tiap – tiap basis massa, tentunya dapat membuat para petahan diterima dan didukung kembali oleh para konstituen masyarakatnya yang terdapat pada Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kota Surabaya.

Bagi tim pemenangan masing – masing aktor, komunitas relawan merupakan bagian dari aktor politik penting untuk dapat meraup suara pada pemilih pemula. Mereka juga akan memberikan *image* yang baik pada para aktor politisi, disisi lain program kampanye yang mereka lakukan memiliki variasi yang berbeda dengan kelompok partisan sehingga jaringan kampanye politik akan semakin meluas. Adi yang merupakan mantan reporter wartawan juga menggunakan jaringan politik yang merupakan suatu jaringan dimana ikatan – ikatan politik yang menghubungkan satu aktor politik ke aktor politik lain dalam jaringan politik itu adalah hubungan politik. Jaringan politik dapat terdiri dari individu – individu, kelompok-kelompok, dan organisasi – organisasi politik. Selain dukungan dari partai sendiri seperti PAC, DPC dan DPD, komunitas non-partai berusaha memberikan pandangan kepada pemilih pemula untuk memilih sebagai anggota legislatif dari partai PDIP, PKB atau Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 kota Surabaya. Wilayah inilah yang menjadi fokus untuk berkampanye dan bersosialisasi guna mendapat suara dari masing – masing pemilih berdasarkan aliran partainya. Ada yang marjinal dan mayoritas memilih PDIP lalu kelompok jaringan organisasi keagamaan mayoritas memilih PKB dan mensejahterahkan masyarakat ialah Partai Demokrat.

Hasil penelitian ini menganalisis konteks karir terkait jaringan politik dalam melihat kepentingan dari massa pendukung dalam mendukung Adi Sutawijono, Laila Mufidah, dan Herlina Harsono Njoto. Pemilih pemula untuk memenangkan masing – masing petahana politisi ialah salah satunya adanya peran komunitas relawan yang

non-partai dapat menunjang suara dalam pemilu legislatif pada tahun 2019 ini. Kelompok sosial tersebut bukan hanya memiliki karakteristik interaksi politik berbeda, tetapi juga mengembangkan cara atau strategi tersendiri dalam melakukan perannya mempengaruhi pemilih untuk calon legislatifnya. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan masyarakat yang masih dalam proses belajar berdemokrasi seperti Indonesia, yang mana transisi demokrasi tersebut ditandai dengan dinamika politik yang cepat, kompetisi dan konflik dikalangan elite, seringkali terlihat bahwa kelompok pertemanan cukup berpengaruh karena dilatar belakangi dan persamaan keyakinan. Komunitas relawan atau komunitas non-partai ini merupakan fenomena menarik dalam proses pemilihan legislatif kota Surabaya khususnya di dapil 3 dimana keterlibatannya sangat membantu dalam proses kampanye, yaitu sebagai salah satu relawan tim pemenangan petahana politisi sehingga sekarang menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya yang sudah menjabat dari satu kali periode.

Penelitian ini berfokus kepada karir aktor yang memiliki basis massa pendukung yang menurut peneliti sangatlah kuat dan petahana atau lebih dari sekali jadinya yakni Adi Sutarwijono, Laila Mufidah, dan Herlina Harsono Njoto selaku aktor politisi dalam menjaga kepercayaan terhadap konstituen yang di bangunnya serta relasi yang sudah di bangun tidak di tinggalkan. Serta peneliti juga berfokus sampai sejauh mana masing – masing aktor politisi membangun karirnya dengan membaca kesempatan – kesempatan yang ada untuk melakukan strategi pendekatan terhadap pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk melakukan *lobbying* mengatur elit strategisnya dalam pencalonan legislatif tahun 2019. Kemudian mengenai hubungan dengan sektor relawan dengan melihat massa penudukung yang membantu memenangkan masing – masing calon serta mendapatkan suara yang di bilang cukup banyak sehingga beliau sekarang menduduki kursi ketua Dewan Kota Surabaya pada periode 2019 – 2024. Lalu ada Laila Mufidah selaku Wakil Ketua

DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Herlina Harsono Njoto selaku Anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat.

Peran individu dari caleg sangatlah penting untuk membranding dirinya sendiri agar dikenal oleh konstituen atau masyarakat. Tentunya kinerja dari Adi Sutarwijono ini sangat membantu dalam urusan pendidikan, Kesehatan, pembangunan, dan lain sebagainya untuk mensejahterakan warga yang ada di daerah pemilihan 3 tepatnya di Rungkut. Masyarakat sangat mempercayai atas etos kerja yang baik dari Adi, Laila dan Herlina sendiri sehingga beliau dalam setiap kontestasi dari tahun 2014 dan 2019 terpilih terus menerus dan sekarang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Dilansir dari data (KPU, 2019) berbicara mengenai kontestasi dalam Dapil 3. PDIP memang meraup perolehan suara terbanyak dari partai – partai lainnya, Ditinjau dengan perolehan suara pada masing – masing partai. Urutan 3 posisi teratas dalam perolehan prosentase suara di Daerah Pemilihan 3, yakni pada partai: 1. PDIP (31.852) 2. PSI (13.490) dan 3. PKB (10.090) maka dari itu dengan prosentase jumlah suara partai terbanyak maka perwakilan dari PDIP dalam kontestasi Pileg tahun 2019 kemarin diwakilkan 3 legislatif diantaranya: 1. Adi Sutarwijono (17.431) 2. Abdul Ghoni (4.537) dan 3. Anas Karno (5.386).

Meilisa (2019), menjelaskan perjalanan karir politik Adi Sutarwijono dimulai pada tahun 1996 yang mana pada saat itu Adi Sutarwijono bekerja sebagai wartawan harian Surya dan sering sekali mewawancarai Bambang DH saat itu masih menjadi inisiator gerakan melawan rezim orde baru, dan pada tahun 2003 Bambang DH merekrut Adi Sutarwijono sebagai kader partai PDI Perjuangan. Pembawaan sifat egaliter saat menjadi wartawan dahulu hingga terbawa menjadi anggota dewan yang dimana selalu mementingkan kepentingan rakyat misal dalam hal menyediakan sarana dan prasarana memadai serta memberi hak kelayakan terhadap konstituennya.

Dilansir dari berita Redaksi (2019), menjelaskan bahwasanya awal mula karir politik dari Hj. Lailah Mufidah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berawal dari keikutsertaannya dalam Fatayat NU, beliau memasuki Fatayat karena didasari dari *background* dari keluarganya yang beraliran agama sedari Laila kecil dan merupakan lulusan dari pondok pesantren. Maka dari itu kertarikannya dalam dunia politik sedari kecil membawa Laila menjadi Anggota DPRD Kota Surabaya dari Dapil 3 Kota Surabaya mewakili dari Fraksi PKB dan pada putarannya pada periode 2019 – 2024, Laila berhasil mencetak suara sebanyak 11.052 suara (KPU, 2019) dan beliau berhasil menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya karena didukung dari jumlah suara dari partainya yang sangat mendukung.

Berikut adalah perjalanan karir dari Herlina Harsono Njoto yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada periode 2019 – 2024 yang merupakan Fraksi dari Partai Demokrat. Herlina merupakan Anggota DPRD Kota Surabaya yang sudah menjadi anggota dewan 3 periode sedari tahun 2009 dan tetap pada Daerah Pemilihan 3 Kota Surabaya. Beliau merupakan alumni dari Universitas 17 Agustus 1945 yang mana sedari duduk di bangku perkuliahan Herlina sangat aktif sekali mengikuti organisasi, sehingga pada tahun 2008 Partai Demokrat membutuhkan kuota 30% keterwakilan perempuan sehingga dari situlah Herlina memulai karirnya didalam dunia politik dan didukung pada saat itu Herlina sangat mengagumi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Pramita, 2020). Pada pemilihan yang sudah memasuki tahun ketiganya ini beliau meraup suara sebanyak 7.535 suara dan didukung dengan jumlah suara dari Partai Demokrat sebesar 5.121 (KPU, 2019).

Penelitian ini berfokus kepada petahana yang mencalonkan kembali pada kontestasi Pemilu Legislatif yang digelar pada 17 April 2019. Pada kontestasi pileg yang diikuti oleh 16 partai, dan masing – masing partai diikuti oleh individu perorangan yang ingin maju menjadi bakal calon Legislatif. Setiap partai politik terdapat 9 orang

nama – nama yang ikut berkontestasi, tetapi pada pemilihan jumlah perolehan suara yang signifikan akan mendapatkan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang paling mendominasi. Hal ini dilansir oleh data KPU (2019), yang menjelaskan perolehan suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni sebanyak 31.852 dengan total kandidasi terdapat 9 orang yang mengikuti kontestasi dan yang mewakili pada kursi parlemen sebanyak 3 orang. Selanjutnya terdapat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendapatkan perolehan suara terbanyak kedua, yakni 10.090 dengan total kandidasi terdapat 9 orang yang mengikuti kontestasi dan yang mewakili pada kursi parlemen sebanyak 1 orang. Selanjutnya terdapat Partai Demokrat dengan perolehan jumlah suara partainya yakni sebesar 5.121 dan mendapatkan perolehan kursi pada parlemen hanya 1 orang yang mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan 3 Kota Surabaya. Dan sisanya didapatkan oleh partai yang mendapatkan perolehan suara yang signifikan, tetapi pada setiap partai hanya mendapatkan jatah kursi 1. Yakni Partai Gerindra mendapatkan 1 kursi, Partai Golkar 1 kursi, Partai PKS 1 kursi, Partai PSI 1 kursi. Dengan total keseluruhan 16 partai yang mengikuti kontestasi, hanya ada 7 partai dan 9 orang dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kota Surabaya yang lolos untuk menduduki kursi Legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana jaringan politik Petahana dalam memenangkan kontestasi di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kota Surabaya?
- 1.2.2. Bagaimana penguatan dan perluasan jejaring yang dilakukan Petahana dalam memenangkan kontestasi di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui jejaring politik Petahana dalam memenangkan kontestasi Pemilu Legislatif di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kota Surabaya.
- 1.3.2. Untuk mengetahui penguatan serta perluasan jejaring yang dilakukan oleh Petahana untuk memenangkan kontestasi di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara akademis sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca bersifat sosiologis dan politis tentang relasi dan jejaring politik dengan begitu pembaca akan merasakan manfaat akademis. Serta penelitian ini bisa menjadi pembelajaran tentang realitas pemilihan legislatif di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 kota Surabaya sebagai rujukan pembelajaran kedepan.

Penelitian ini juga diharapkan secara praktis memberikan manfaat melalui analisis untuk mengetahui bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat yang di berikan kepada aktor politik yang ada pada Daerah Pemilihan 3 Kota Surabaya yang juga selaku *Incumbent* tentunya agar setiap relasi yang sudah dibangun itu tidak di tinggalkan.

1.5. Konseptualisasi

1.5.1. Konsep Jejaring Politik

Jejaring politik menurut Knoke (1989) menjelaskan sistem politik berupa jaringan sosial Unit dasar dari setiap sistem politik yang kompleks bukanlah individu, tetapi posisi atau peran yang ditempati oleh aktor sosial dan hubungan atau koneksi antara posisi – posisi ini. Secara konvensional jaringan politik memahami peran atau status, komponen tindakan dari suatu peran sebagai kumpulan hak, tugas, kewajiban, dan ekspektasi yang diartikulasikan dengan jelas yang memandu perilaku khas orang yang mengambil posisi seperti itu dalam sistem sosial misalnya dalam peran bukan hanya label saja untuk serangkaian kegiatan yang sesuai, itu juga menunjukkan bagaimana seorang petahana diharapkan berinteraksi dengan peran lain dalam situasi yang sesuai. Hubungan – hubungan ini merujuk pada konstanta perilaku dan pada konten atau kualitas tertentu dari interaksi antara orang – orang yang menempati posisi peran yang beda – beda. Untuk setiap individu yang mengikuti kontestasi dan memiliki jejaring politik tentunya memiliki aturan atau norma perilaku untuk menentukan aktor mana yang lebih mungkin untuk mematuhi perintah yang lain.

1.5.2. Konsep Partai Politik

Konsep partai politik mengemukakan kekuasaan untuk mewujudkan program – program yang sudah tersusun berdasarkan ideologi dari masing – masing partai yang ada dengan melihat kapabilitas dari setiap partai. Adapun cara yang digunakan partai politik dalam sistem pemerintahan dan sistem politik yang demokrasi untuk mendapatkan kekuasaan yang ada adalah dengan mengikuti pemilihan umum, adapun cara yang digunakan oleh partai tunggal biasanya berupa ketotaliteran paksaan yang langsung ditujukan kepada orang tertentu dan psikologis oleh suatu kediktatoran kelompok (komunis) bahkan diktator individu (fasis). Berdasarkan partai politik yang

memerintah partai politik yang tidak mencapai jumlah maksimal di kursi legislatif atau perwakilan rakyat maka tugas dari partai tersebut yakni melihat atau menkontrol terhadap partai yang jumlah suaranya non minoritas (Surbakti, 1992: 149).

Karir politik seseorang dapat ditentukan oleh rekrutment politik dari masing – masing partai lalu ditinjau dari tingkat keaktifannya dalam partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti, Rekrutment politik adalah penunjukan atau penyeleksian seorang atau dalam bentuk grup guna melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik dan pemerintahan pada umumnya. Fungsi ini ditinjau manakala ukuran dari partai politik tersebut tunggal. Tunggal yang dimaksudkan ialah partai tunggal merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga memiliki otoritas membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Tujuan dari rekrutment dan meninjau dari karir politiknya seseorang sangat penting untuk mempertahankan kekuasaan dan penting bagi berlangsungnya sistem politik sebab tanpa aktor elit yang mampu melaksanakan peran – perannya, sistem dari partai politik tersebut bisa jadi akan terancam (Surbakti, 1992: 150).

Menurut Ramlan Surbakti, Partisipasi politik adalah bentuk sumbangsih dari warga negara untuk bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan umum untuk menentukan siapa yang bakal menjadi kepala pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud yakni mengajukan kritikan, melaksanakan keputusan, mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu dan menentukan wakil rakyat siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Maka dalam hal ini partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan dan mendorong masyarakat atau bahkan dari aktornya sendiri untuk menggunakan partai sebagai saluran kegiatan untuk mempengaruhi proses politik (Surbakti, 1992: 151).

1.5.3 Konsep Interaksi Sosial

Menurut Kacung Marijan, Interaksi sosial yakni adanya relasi antara aktor terhadap masyarakat bisa berlangsung dengan baik pasca Pemilu secara langsung. Melihat konteks yang akuntabilitas, aktor baik Kepala Daerah maupun pejabat perwakilan rakyat harus menjalin hubungannya dengan konstituen karena selama jabatannya dituntut guna melaporkan dan menyebarkan informasi tentang apa yang sudah dikerjakan dan harus transparasi agar konstituen ini terlihat percaya akan kinerja dari para aktor. Melalui informasi seperti ini, masyarakat juga dituntut untuk mengetahui dan memberikan penilaian performa apakah yang sudah dikerjakan oleh para aktor ini sesuai *rules* yang berlaku dan apakah sesuai dengan janji – janji yang diberikan pada saat melakukan sosialisasi atau kampanyenya, sekiranya apa yang dikerjakan oleh para aktor ini tidak mengecewakan sehingga konstituen semakin percaya dan tentunya akan memilihnya kembali pada putaran periode selanjutnya (Marijan, 2010: 210).

Winardi (2003) mengemukakan bahwasanya interaksi sosial yakni interaksi – interaksi yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan sosial konstituen – konstituen atau masyarakat untuk dapat tercapainya kontak dengan orang lain secara langsung. Kebutuhan akan identifikasi bantuan timbal balik misalnya dengan melihat suatu grup untuk dapat mencapai tujuan tertentu.

Organisasi sosial merupakan unit sosial atau pengelompokan manusia yang dibentuk atas pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan – tujuan tertentu (Reksohadiprodo dan Handoko, 2001) mengklasterkan sebagai berikut:

1. Organisasi merupakan lembaga yang didalamnya terdiri dari perkumpulan seseorang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan.
2. Organisasi dikembangkan untuk dapat tercapainya tujuan – tujuan tertentu.
3. Organisasi secara sadar dikoordinasikan dan disusun atas kegiatan – kegiatan dan dapat dibedakan atas kategori berdasarkan susunan yang sudah diterapkan

dan sudah logis susunannya sehingga tugas dan wewenangnya sudah jelas dan tidak terjadi *miscomm*.

4. Organisasi adalah instrumen interaksi sosial yang memiliki batasan – batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi dan dapat dilihat secara langsung untuk meninjau keberadaannya yang tidak dapat dirubah. Seperti pada Daerah Pemilihan yang notabene sudah sesuai dengan wilayah adminstrasinya pencalonan.

1.5.4. Konsep Kontestasi

Pada konsep kontestasi bahwasanya mengandung pengertian bahwa ada pihak – pihak yang bertentangan sehingga menimbulkan *clash of argument*. Dalam lingkup ini ada pertukaran yang saling bersaing terhadap nilai, fakta dan kebijakan terhadap sumber – sumber masalah yang memotivasi tindakan – tindakan (Vancil, 1993:70). Kontestasi memperlihatkan masalah – masalah dari berbagai perspektif yang berbeda, saling bersaing. Pertama, apakah setiap aktor menggunakan kata untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada di dalam pemikiran mereka lalu yang Kedua, mencakup siapa – siapa yang pro dan dan siapa-siapa yang kontra (*agents*). Selanjutnya Ketiga, melakukan identifikasi terhadap sebab – sebab kontroversi yang berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif – motif. Dan yang terakhir Keempat, mencermati tentang karakteristik dan sejarah keyakinan dan kebijakan yang ada sekaligus mempertimbangkan nilai dan kebijakan yang seperti apa yang akan ditawarkan dalam kontestasi tersebut.

1.5.5. Konsep Daerah Pemilihan

Pada konsep Daerah Pemilihan (Dapil) ialah pembentukan wilayah berdasarkan administrasi atau jumlah penduduk. Setiap wilayah atau dapil diwakili satu kursi atau lebih. Salah satu unsur yang membedakan sistem pemilihan umum adalah lingkungan Dapil tersebut. Partai politik atau individu per-orangan bersaing dalam pemilihan

umum untuk memenangkan kursi mewakili dapil tersebut. Namun, pemilih yang terdaftar di Dapil tersebut yang berhak menentukan siapa pemenang di Dapil tersebut melalui pemilihan umum. Dapil yang jelas akan memungkinkan warga negara yang berhak memilih dan terdaftar sebagai pemilih secara sah dihargai sebelum, saat, dan setelah memilih wakil mereka. pembentukan Dapil harus berdasarkan prinsip persamaan kedudukan antar warga negara dalam hukum dan pemerintahan yang dalam kajian pemilihan umum disebut satu orang, satu suara, dengan nilai setara. Aplikasinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum tampak pada penentuan alokasi kursi untuk setiap Dapil, yaitu setiap Dapil mendapat alokasi kursi sesuai dengan jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut. Prinsip ini diwujudkan untuk mencegah kemunculan Dapil yang kurang terwakili ataupun Dapil yang terwakili secara berlebihan. Karena dalam praktik tidak mungkin setiap Dapil memiliki jumlah penduduk yang sama, biasanya terdapat batas toleransi (Surbakti, 1992: 67).

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Jaringan Politik

Berbicara mengenai sebuah pemerintahan pasti akan terjadi hubungan antara elit dengan kebijakan yang telah dibuat. Pada teori jejaring politik juga akan menjelaskan lebih detail tentang kontestasi pada karir politik dalam jaringan politik dan konsep interaksi sosial yang dimiliki elit untuk bisa mempertahankan petahana dalam kontestasi Pilihan Legislatif tahun 2019. Bahwasanya petahana dalam elite merupakan hubungan antara elite yang memimpin dengan mayoritas masyarakat yang dipimpin. Bila dihubungkan dengan organisasi dari sang calon dengan partai, maka diantara mayoritas yang dipimpin, beberapa akan ada yang mempunyai akses lebih untuk mempengaruhi elite yang memimpinya. Beberapa mayoritas memiliki akses pada elite yang merupakan kelompok atau individu yang terpilih karena mempunyai peranan untuk memerintah.

Sebagai elemen dari kunci modal sosial, memiliki daya berupa jaringan adalah yang tertanam di dalamnya, tersedia melalui, dan berasal dari ikatan hubungan seseorang. Ikatan hubungan seseorang mempengaruhi sejauh mana dia terhubung dengan anggota lain dalam jaringan yang kuat dan lemah. Ikatan yang kuat biasanya dikaitkan dengan keunggulan kinerja karena peningkatan kepercayaan dan kerja sama, dan efektif dalam memfasilitasi aliran informasi terperinci dan transfer pengetahuan diam – diam dan kompleks melintasi batas – batas departemen dalam suatu organisasi. Ikatan yang lemah, yang menjembatani kelompok – kelompok yang terputus secara sosial, juga bermanfaat bagi kinerja karena mereka menyediakan akses ke sumber daya jaringan yang baru, tidak berlebihan, dan heterogen. Hubungan ini mengikat baik yang kuat maupun yang lemah membantu seseorang untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang berharga. Melalui interaksi sosial yang sering, sumber daya dapat digabungkan, difasilitasi, dan dipertukarkan lebih lanjut secara efisien di antara

anggota jaringan untuk menciptakan sumber nilai baru. Aliran penelitian ini mengacu pada pentingnya sumber daya jaringan relasional dalam menjelaskan hasil (Wei, 2012: 385).

Lain halnya dengan jenis sumber daya lain, sumber daya jaringan berasal dari keuntungan informasional yang diperoleh dari hubungan sosial dan dapat digunakan untuk memajukan keuntungan pribadi. Individu bukanlah pembuat keputusan yang terpisah – pisah melainkan secara sosial tertanam dalam jaringan hubungan. Karena sumber daya jaringan berakar pada hubungan, kemampuan untuk berinteraksi dengan dan memengaruhi orang lain penting untuk memperoleh sumber daya ini. Dipersenjatai dengan ikatan dan kontak yang berguna, seorang individu dengan keterampilan politik yang tinggi dapat lebih mudah mendapatkan akses ke basis informasi yang lebih luas, memobilisasi pengaruh pribadi, dan mengakses sumber daya berharga yang mengurangi biaya transaksi (Wei, 2012: 383).

Mengenai unsur jejaring politik yang mana sistem politik ini ialah jaringan sosial Unit dasar dari setiap sistem politik yang kompleks bukanlah individu, tetapi posisi atau peran yang ditempati oleh aktor sosial dan hubungan atau koneksi antara posisi – posisi ini. Para antropolog dan sosiolog secara konvensional memahami peran atau status, komponen tindakan dari suatu peran sebagai kumpulan hak, tugas, kewajiban, dan ekspektasi yang diartikulasikan dengan jelas yang memandu perilaku khas orang yang mengambil posisi seperti itu dalam sistem sosial misalnya dalam peran bukan hanya label saja untuk serangkaian kegiatan yang sesuai, itu juga menunjukkan bagaimana seorang petahana diharapkan berinteraksi dengan peran lain dalam situasi yang sesuai. Hubungan – hubungan ini merujuk pada konstanta perilaku dan pada konten atau kualitas tertentu dari interaksi antara orang – orang yang menempati posisi peran yang beda – beda. Setiap peran sosial baik itu dari pengacara (*lawyer*), bos, atau secara konkret hanya dalam kaitannya dengan satu atau lebih peran pelengkap yang secara teratur berinteraksi anak perempuan, klien, karyawan, pribadi. Untuk setiap

pasangan peran tertentu, aturan atau norma perilaku biasanya menentukan aktor mana yang lebih mungkin untuk mematuhi perintah yang lain (Knoke, 1989: 7).

Keputusan – keputusan di mana jaringan dimobilisasi untuk memengaruhi hasil – hasil tanpa demonstrasi bahwa kelompok inti ini memenangkan perkelahiannya, desinasi elit penguasa tampaknya terlalu dini. Terlepas dari keterbatasan ini, penelitian mereka merupakan kemajuan penting menuju pengembangan analisis struktural yang benar – benar dari kekuatan masyarakat. Dengan memperhatikan pola ikatan di antara orang – orang yang menghubungkan organisasi, mereka mengalihkan fokus dari reputasi dan atribut individu ke konfigurasi total antar organisasi. Pandangan alternatif tentang struktur kekuasaan masyarakat tergantung pada komponen dualitas mana yang ditekankan: 1. Organisasi berfungsi sebagai arena di mana orang – orang dengan populasi bersama bertemu untuk mengoordinasikan strategi bersama mereka. Struktur kekuatan komunitas adalah alat yang melaluinya kepentingan pribadi dan keluarga dapat terwujud. 2. Orang-orang berfungsi sebagai hubungan antar organisasi berdasarkan keanggotaan bersama mereka. Struktur kekuatan masyarakat adalah pola pertukaran informasi dan sumber daya yang memungkinkan serangkaian organisasi mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mewujudkan kepentingan unik dan bersama mereka (Knoke, 1989: 130).

Maka dari itu sesuatu yang berhubungan dengan elite pasti mempunyai hubungan timbal balik yang terjadi antara keduanya, disini elite mempunyai beberapa tugas – tugas untuk dicanangkan agar bisa berperan sesuai dengan fungsi sosial yang sudah ditentukan. Terdapat 3 fungsi penting yang harus dilakukan : 1. melihat hubungan antara kelompok kecil hingga sasaran kolektif dapat tercapai, 2. guna menyatukan norma – norma ideal yang menentukan setiap kolektivitas dan ketergantungan hidup, dan 3. guna melambangkan solidaritas dilakukan berbagai tata cara dan pertemuan. Dibalik hal ini bisa dilihat terjadinya hubungan antara elit dengan publik pasti akan melakukan hubungan yang saling membantu, agar terjadi timbal balik

yang positif untuk saling mengawasi dalam berjalannya pemerintahan. Para tokoh layaknya seperti *de Tocqueville* dan *Simmel* juga memaparkan bahwasanya akan terjadi hubungan timbal balik yang terjadi antara masyarakat dan elite. Masyarakat hanya melihat atau memantau elit. Maka sebab itu peran elit sangat mempengaruhi terutama dalam memberikan pengaruh dukungan, dan dukungan itu dalam sebuah proses demokrasi biasa disebut dengan elektoral, dilihat dari peran seorang elit untuk melakukan timbal balik ini yang digunakan oleh calon seorang pemimpin untuk melakukan *change* kepentingan agar elektoral suara yang dimiliki bisa meningkat dengan maksimal. Hal itu pula yang terjadi dalam proses Pemilihan Legislatif 2019 dimana calon wakil rakyat banyak melakukan *lobbying* dengan banyak elit agar bisa menaikkan suara dan bisa dikenal secara luas oleh konstituen atau masyarakat (Keller, 1984).

Dalam membedah buku dari pakar Suzanne Keller (1984) yang diterbitkan olehnya yang berbicara tentang penguasa dan kelompok elit. Suatu ketenaran dalam dunia politik dan ditinjau dari bertahannya minoritas – minoritas yang berpengaruh adalah suatu ciri tetap dalam kehidupan sosial yang menjerumus dalam masyarakat plural. Paham mengenai adanya suatu lapisan yang ditinggikan di atas massa orang banyak dapat menimbulkan sikap pro dan kontra, tidak terlewatkan ataupun putus asa, namun tanpa menghiraukan persepsi orang akan hal ini, dalam kenyataannya kehidupan mereka, keberuntungan mereka, peruntungan mereka sejak dulu kala tetap tergantung kepada apa yang difikirkan dan diperbuat oleh segelintir orang – orang tersebut.

Menurut Suzanne Keller (1984), memaparkan juga bahwasanya elite tidak bersifat tunggal, elite merupakan individu atau kelompok yang memiliki latar belakang massa masing – masing. Elite – elite yang menonjol ini merupakan minoritas kecil yang terorganisasi rapi dan kohesif dan masyarakat dianggap dapat diatur dikarenakan sifatnya yang mayoritas dan apatis. Pihak – pihak yang memiliki keahlian dan

keterampilan tertentu yang dapat mengorganisasi massa di dalam maupun luar pemerintahan akan disebut 'elite strategis'. Elite sebagai penguasa juga dapat melakukan monopoli kekuasaan yang memudahkan untuk tujuan-tujuan yang baik bagi mayoritas yang dipimpinnya, seperti menyejahterakan rakyat, peningkatan pendidikan, perluasan lapangan kerja, tetapi juga dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti mencari keuntungan sendiri untuk kepentingan individu dan kelompok.

Dinamika elite dalam konteks sebuah organisasi sosial dan kerangka sistem politik, merupakan kelompok kepentingan (*Interest group*) yang terlibat proses fungsi input. Intensitas kelompok ini dalam melakukan input tergantung oleh dinamika internal dan kekuatan moral yang menggerakkan aktivitas dan perubahan kelompok tersebut. Dinamika dalam elite lokal sangat dipengaruhi oleh adanya konstruk dan pola kehidupan suatu kelompok. Hal ini karena antara kelompok sosial di masyarakat memiliki karakter masing – masing. Seringkali adanya suatu kepentingan individu dalam suatu tujuan kelompok mengakibatkan persaingan internal kelompok tersebut. Dari pandangan eksternal antara kepentingan kelompok satu dan lainnya menciptakan suatu persaingan yang tidak jarang menimbulkan konflik. Kelompok ataupun pengaruh individu inilah yang merupakan elite yang menciptakan dinamika dalam kehidupan sosial politik (Keller, 1984).

Menurut pandangan dari pemikir Suzanne Keller menjeaskan bahwasanya aktor politik pada masa transisi demokrasi ini banyak didominasi oleh pelaku lama dan peserta baru yang lahir dari elite lokal di daerah. Lahirnya elite lokal ini merupakan suatu bentuk gerakan kelompok kepentingan yang ada di masyarakat. Pada awalnya kelompok ini terpaksa tertekan pada sistem pemerintahan, namun dalam perkembangannya kelompok – kelompok kepentingan ini mulai muncul dan ikut dalam pesta demokrasi seiring dengan adanya transisi sistem politik pemerintahan. Elite sendiri memiliki perbedaan sesuai dengan karakter wilayahnya, dimana dalam lingkup wilayah kecil seringkali elite lokal bersifat tunggal dalam artian kekuasaannya mutlak

disemua bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama. Dalam lingkup wilayah yang luas kecenderungan distribusi kekuasaan tidak dikuasai secara tunggal. Melainkan banyak kepentingan yang hadir menguasai setiap bidang aspek kehidupan masyarakat (Keller, 1984).

Konsep *plural society* dalam konteks masyarakat Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Furnivall, sebagai gambaran masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri – sendiri tanpa ada pembaruan satu sama lain dalam suatu tatanan politik. Dari konsep yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dengan kemajemukan yang dimiliki telah menjadi wacana kulturalnya bukan hanya pada masa Hindia Belanda yang justru lebih banyak mengandung muatan ekonomi dan politik, tetapi jauh sebelumnya kemajemukan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kehadirannya, sehingga memperlihatkan ciri yang unik secara horizontal dan vertikal, sebagaimana dikatakan oleh Nasikun, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan yang ada seperti suku bangsa, agama, adat dan kedaerahan. Secara vertikal struktural masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan – perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan kedaerahan, seringkali disebut sebagai ciri khas masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk (Nasikun, 1995).

Salah satu instrument terpenting dari elit pada karir politik adalah dengan melihat adanya jenjang karir politik yang didukung oleh jaringan – jaringan yang mendukungnya untuk maju dalam kontestasi Pileg dalam Pemilihan Umum atau Pilihan Legislatif khususnya bagi Adi Sutawidjono, Hj. Laila Mufidah dan Herlina Harsono Njoto. Tentunya adanya *lobbying* kepada partai politik tingkat daerah bahkan pusat agar kepentingan yang dimaksud bisa dimasukkan dalam daftar yang sudah diinginkan seperti pada penempatan nomor urut, wilayah administrasi dan karir – karirnya dari

para aktor disetiap masing – masing partai agar dipertimbangkan untuk maju dalam Pilihan Legislatif, melihat basis dari setiap partai tentunya sangat penting juga untuk dipertimbangkan agar para calon yang ingin mencalonkan tidak salah sasaran untuk menarik simpati dari konstituen atau masyarakat yang ada pada Daerah Pemilihan 3 Kota Surabaya. Dan melihat interaksi sosial yang ditujukan pada masyarakat pluralitas untuk melakukan pendekatan – pendekatan kembali dan menawarkan beberapa program kerja yang dijanjikan apalagi sebagai petahana sangat diperhitungkan tingkat *trust* agar dapat mensejahterakan rakyat atau konstituen yang notabene berasal dari daerah administrasinya.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Fokus Penelitian

Berpusat kepada karir aktor elit politik yakni Adi Sutawijono selaku anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto selaku Anggota DPRD Kota Surabaya yang sudah menjabat 3 kali periode dan sekarang menjabat kembali pada periode 2019 – 2024 perwakilan dari Partai Demokrat, selanjutnya terdapat Hj. Laila Mufidah selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yang sudah menjabat 2 kali periode dan beliau sekarang menjabat pada periode 2019 – 2024 dari perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagai peran wakil masyarakat atas kepentingan – kepentingan yang akan di hadapi pada tahun ini atau pada periode 2019 – 2024. Maka dari itu penulis disini hendak mengetahui seberapa besar karir jaringan politik yang di bangun oleh Adi Sutawijono, Herlina Harsono Njoto dan Hj. Laila Mufidah untuk mendapatkan posisi strategis pada saat kontestasi pemilu legislatif sehingga masyarakat yang ada di daerah pemilihan (Dapil) 3 kota Surabaya sangat tidak asing dengan nama ketiganya tersebut, peran jaringan politik disinilah Adi, Laila, dan Herlina bisa menempati nomor urut paling atas dan mudah dilihat dan di ingat oleh konstituen. Maka dari sini tidak luput dari yang namanya *lobbying* kepada kepengurusan partai yang ada di tingkat kecamatan, kota, bahkan yang ada di pusat. Seberapa jauh interaksi sosial yang di bangun oleh Adi Sutawijono, Laila Mufidah, dan Herlina Harsono Njoto terhadap masyarakat yang ada di daerah pemilihan (Dapil) 3 kota Surabaya, sehingga masyarakat masih mempercayai kinerja yang sudah memasuki masa periode jabatannya yang saat ini.

1.7.2. Tipe Penelitian

Bersifat penelitian deskriptif, yaitu pemaparan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang karir politik yang berhubungan dengan jaringan apa saja yang dibentuk untuk memberikan *interest* kepada konstituen oleh Adi Sutawijono, Hj. Laila Mufidah, dan Herlina Harsono Njoto dengan cara mencari hal – hal baru yang mungkin belum ditemukan oleh peneliti – peneliti lainnya melalui dokumen – dokumen yang dimiliki oleh peneliti sendiri.

Dengan tipe ini, diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas dan terstruktur terkait karir politik dalam melihat peran jejaring politik dalam mendukung kemenangan Adi Sutawijono, Laila Mufidah, dan Herlina Harsono Njoto. Dengan demikian dapat menghasilkan sebuah penelitian yang menjadi referensi karir aktor dalam jaringan politik dengan peran – peran yang mendukung.

1.7.3. Subyek Penelitian

Subyek berupa aktor elit politik yakni Adi Sutawijono selaku anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto selaku Anggota DPRD Kota Surabaya yang sudah menjabat 2 dan 3 kali periode dan sekarang menjabat kembali pada periode 2019 – 2024 perwakilan dari Partai Demokrat, selanjutnya terdapat Hj. Laila Mufidah selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yang sudah menjabat 2 kali periode dan beliau sekarang menjabat pada periode 2019 – 2024 dari perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Data

1.7.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Subyek yang menjadi pusat wawancara adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya yakni Adi Sutarwijono yang terjun ke dunia politik dari yang sebelumnya adalah seorang wartawan. Lalu terdapat Laila Mufidah sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari PKB dan Herlina Harsono Njoto selaku Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Demokrat. Wawancara ini merupakan proses Tanya jawab yang dilakukan melalui secara lisan oleh pihak yang berhadapan langsung secara tatap muka yang dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya pada Adi Sutarwijono dan Hj. Laila Mufidah, dan bersama Herlina Harsono Njoto dilakukan *daring* melalui aplikasi Zoom. Wawancara juga dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah dirumuskan terlebih dahulu dalam daftar pertanyaan serta yang muncul secara spontan. wawancara ini bertujuan untuk mengetahui fakta – fakta atau peristiwa yang ditanyakan kepada responden. Hal ini digunakan peneliti untuk lebih memahami permasalahan yang diteliti.

1.7.4.2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat

berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan memperkuat bukti dari keterangan untuk menunjang keabsahan dari penelitian.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif: Pertama, memiliki peluang lebih besar untuk mengeksplorasi keyakinan dan sikap responden. Kedua, metode ini dapat menjelaskan ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ bukan sekedar ‘apa’. Ketiga lebih mengandalkan pada tindakan dan pikiran responden. Teknik analisis data ini bertujuan untuk menyusun data agar tersusun rapi, dimana di mulai dari wawancara langsung dengan pihak – pihak yang terkait serta kumpulan bahan – bahan yang didapat untuk menunjang penelitian. Selain itu data – data primer dan data sekunder yang di dapat peneliti juga akan menunjang dalam menganalisis data.

Dalam proses menganalisis data yang dilakukan pertama kali adalah mentranskrip hasil wawancara dan ditata dengan baik sesuai urutan – urutan pertanyaan permasalahan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan pemetaan dan penyederhanaan data, kemudian dilakukan penyusunan data agar tersusun rapi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil temuan data dengan menghubungkan teori yang relevan, setelah itu mulai menyusun suatu kesimpulan.